



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 134/HK.310/M/12/2019
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Kampanye dan Sosialisasi Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

4 Desember 2019

Yth.:

1. Para Gubernur (daftar terlampir)
2. Para Bupati dan Walikota (daftar terlampir)

di-
Tempat

Bersama ini disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, salah satu tujuannya adalah mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya dengan penetapan kawasan pertanian atau penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Penetapan kawasan pertanian atau penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian untuk keperluan lain di luar pertanian.

Pencegahan alih fungsi lahan pertanian pangan tersebut, khususnya pada lahan beririgasi, lahan tidak beririgasi, dan lahan rawa pasang surut/lebak.

Atas dasar hal tersebut, Saudara segera mengambil langkah-langkah, antara lain percepatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, percepatan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Berkelanjutan, melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai kawasan pertanian atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah berkelanjutan, dengan bahan rujukan dapat diunduh di <http://bit.ly/34axcuv>

Perlu disampaikan bahwa bagi provinsi dan kabupaten/kota yang belum ada peta spasial, segera melengkapi peta spasial dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara diucapkan terima kasih.



Menteri Pertanian Republik Indonesia,

Syahrul Yasin Limpo

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri; dan
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.